

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Pemprov DKI Harus Terbuka

Palmerah, Warta Kota

Legislator DKI Jakarta meminta pemerintah daerah untuk membuka kerja sama dengan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Hal ini merupakan buntut adanya dugaan penyelewengan dana umat yang dikelola ACT.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad turut memberikan tanggapannya terkait hal tersebut.

"Jadikan momentum untuk membuka seterang-terangnya. Selama ini banyak yang bertanya bagaimana pola kolaborasi pihak ketiga dengan Pemprov DKI," ucap Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad, Rabu (6/7).

Idris mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta perlu memberitahukan informasi anggaran yang sedang dijalankan bersama organisasi kemanusiaan tersebut. Terlebih, ACT memotong donasi hingga 13,7 persen dari donasi umat untuk biaya operasional.

"Jika benar biaya operasional sangat besar bahkan tak wajar. Jadikan catatan, jika perlu masukkan ke dalam daftar hitam kerja sama," ujarnya. Menurut Idris, Pemprov setempat perlu mengambil sikap tegas.

Sementara, Wagub DKI Jakarta Riza Patria (Ariza) menegaskan tidak pernah menjalin nota kerja sama dengan ACT.

Ariza mengaku ACT langsung bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) DKI Jakarta. "Itu tidak ada hubungannya dengan Pemprov DKI Jakarta," ujar Ariza.

Sedangkan Wakil Ketua Baznas DKI Jakarta atau Baznas (Bazis), Saat Suharto Amjad, mengungkapkan, pihaknya dan Pemprov DKI Jakarta pernah bekerja sama dengan ACT.

"Kami dua kali bekerja sama sama dengan lembaga filantropi (ACT, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat) melalui MOU sejak 2019, dan lembaga-lembaga tersebut disaksikan Pemprov," ujarnya.

Saat Suharto Amjad mengungkapkan kerja sama dengan ACT pernah terjalin di momen Iduladha. Pihaknya sebagai penyulur hewan kurban, sementara ACT yang mengolahnya menjadi makanan siap santap.

Kendati demikian, Saat Suharto Amjad mengatakan tidak pernah berkolaborasi lagi dengan ACT sejak pandemi Covid-19.

Kecewa

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani kecewa dengan kasus dugaan penyelewengan dana yang dilakukan ACT. Apalagi banyak pihak yang telah menyumbang duit ke organisasi kemanusiaan tersebut.

"Jujur kecewa banget, banyak yang

menyumbang ke situ. Kalau dana donasi disalahgunakan itu namanya bukan keterlaluhan, tapi keterlaluhan banget," ujar Zita, Rabu (6/7).

Zita menyarankan, agar pengelolaan keuangan yang dilakukan ACT dapat diaudit oleh pihak yang berkompeten. Jika terbukti bersalah, aparat penegak hukum harus menjatuhkan sanksi pidana kepada yang bersangkutan.

"Saran saya segera diaudit saja kalau benar memang salah, harus ditindak segera agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menggunakan nama donasi untuk kepentingan pribadi," kata putri dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini. **(faf)**